

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. KESIMPULAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru adalah instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah khusus kota pekanbaru. Pada penelitian ini hanya fokus terhadap permasalahan pengelolaan aset daerah berupa lahan/ tanah milik pemerintah kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Brang Milik Daerah. Indikator dalam penelitian ini yaitu (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. (2) Pemanfaatan (sewa lahan), (3) Pengamanan dan pemeliharaan. (4) penatausahaan.

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka hasil dari penelitian ini yang didapat dari hasil analisa indikator penelitian diatas yaitu Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru belum mampu menoptimalkan peranannya sebagai sua pengelola Aset daerah dan juga belum mampu memberikan dampak yang baik bagi pendapatan asli daerah dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

Adapun kendala yang ditemukan adalah dalam proses pemanfaatan berupa sewa-menyewa yaitu : (1) Masih banyak SKPD/OPD yang merahasiakan pemakaian lahan serta pembayarannya tidak terang-terangan sehingga ini dapat dikatakan sebagai tidakan yang merugikan pemerintah daerah dan mengganggu arus kas daerah. (2) Kekurangan personil juga menjadi masalah tersendiri bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, untuk melakukan pengawasan rutin sehingga banyak pihak yang seenaknya saja memakai tanah milik pemerintah kota yang ada di berbagai lokasi. (3) kurangnya kesadaran pihak-pihak pengguna menjunjung tinggi hal-hal yang berbau administrasi serta melengkapi surat-surat penting atas status tanah yang digunakan..

## **6.2. SARAN**

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian yang menemukan berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, saran tersebut mungkin dapat di jadikan masukan dalam penanganan permasalahan dalam pengelolaan aset lahan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru diharapkan memaksimalkan kegiatan pengelolaan lahan serta aset lainnya dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prsarana juga teknologi memadai, serta menambah personil agar pengawasan dapat berjalan seperti yang diharapkan.
2. Meningkatkan disiplin SKPD/ OPD serta pihak ketiga agar senantiasa melaporkan secara rutin keadaan aset yang digunakannya, dan pembayaran sewa lahan juga semestinya harus dibayarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati